

Dewan Pendidikan Komitmen Tingkatkan Rata-rata Lama Sekolah

BOGOR (IM)- Guna mengoptimalkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor, Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor melakukan sosialisasi program kerja lima tahun mendatang dari tahun 2022 hingga tahun 2027 di Aula BJB Cibinong, Rabu (12/10). Itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor baik pembelajaran hingga sarana dan prasarana.

Perlu diketahui bahwa, Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor bertugas untuk menghimpun, menganalisis, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemangku Kepentingan yakni Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan terkait keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terkait kualitas pendidikan maupun sarana dan prasarana sekolah.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor, Takiyuddin Basi, menyampaikan bahwa kehadiran Dewan Pendidikan masa bakti 2022-2027 diharapkan dapat meningkatkan RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Bogor. Pihaknya juga bertekad untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor, demi terwujudnya Bogor Cerdas dan Berkeadaban.

"Investasi dunia pendidikan merupakan hal utama untuk menghasilkan SDM yang unggul di masa depan. Sosialisasi program kerja hari ini, bukan hanya bicara konsep, tetapi kami bertekad merealisasikan program kerja Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor lima tahun kedepan. Kami mengajak semua elemen untuk bekerja bersama-sama dan senantiasa membuka sebarbelahnya untuk menerima aspirasi atau urung rembug terkait pendidikan demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Bogor," ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah menyatakan, Dinas Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tetapi perlu kolaborasi dan sinergi salah satunya dengan Dewan Pendidikan. Dirinya juga berharap Dewan Pendidikan diharapkan dapat menunjang program-program pendidikan di Kabupaten Bogor.

"Saya apresiasi dan terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan, sejak Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor dilantik, sudah terlihat keliling ke berbagai kecamatan di Kabupaten Bogor terutama dalam pelaksanaan kurikulum merdeka sejak 22 Februari 2022 yang wajib kita laksanakan," tuturnya.

Menurutnya, sudah banyak juga program-program pendidikan yang sudah berjalan, seperti peningkatan sarana dan prasarana fisik sekolah, bahkan sebanyak 1.636 rehabilitasi sekolah sudah dilakukan. Kemudian program peningkatan RLS dengan cara menangkul orang-orang pinggiran yang rata-rata pendidikannya rendah. Ada juga program sekolah inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus baik di tingkat SD atau SMP/ sederajat, ada program Kemis Nyunda dan lainnya. "Mari kita kolaborasi, karena kolaborasi kunci keberhasilan," pintanya. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PENCARIAN KORBAN TANAH LONGSOR DI KOTA BOGOR

Sejumlah petugas Basarnas dan BPBD Kota Bogor melakukan pencarian korban tanah longsor di Gang Barjo, Kampung Kebon Jahe, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/10). Pemerintah Kota Bogor mencatat sebanyak delapan warga di kampung tersebut tertimbun tanah longsor saat hujan deras pada Rabu (12/10) sore dengan empat warga selamat dievakuasi, satu warga meninggal dunia dan tiga warga lainnya masih dalam proses pencarian.

Puluhan Desa di Kab. Cirebon Kawasan Permukiman Kumuh

Untuk penataan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan DPKPP Kabupaten Cirebon yakni kawasan yang di bawah 10 hektare. Sedangkan kawasan di atas 10 hektare sampai 15 hektare menjadi kewenangan DPKPP provinsi. Kemudian di atas 15 hektare menjadi kewenangan kementerian.

CIREBON (IM)- Saat ini masih banyak desa di Kabupaten Cirebon yang masuk dalam kategori kawasan permukiman dan permukiman kumuh. Jumlah kawasan permukiman kumuh mencapai 25 desa. Penanganannya sendiri menjadi tanggung jawab Pemda, Pemprov Jabar dan kementerian. Data dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon menyebutkan, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh memang ada aturannya. Hal itu berdasarkan SK Bupati Cirebon. Desanya sendiri yaitu Desa Tawang Sari, Ambulu, Mertasing, Astana, Sarabau, Pangkalan, Pabuaran Kidul, Sindangjawa, Cangoak, Kepuh, Sem-

plo, Warugede, Waruroyom.

Selanjutnya, Kelurahan Sumber, Kelurahan Pejambon, Desa Jatiseung, Kanci Kulon, Karangasem, Danamulya, Jungjung, Dawuan, Panguragan Lor, dan Sitiwinangun.

Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon, Adil Prayitno menjelaskan, anggaran DPKPP di tahun 2023 sebanyak Rp 23,2 miliar. Peruntukannya sesuai dengan tupoksi DPKPP, yakni penataan kawasan kumuh. Serta rumah tidak layak huni (rutilahu).

"Di luar itu, kami tidak bisa masuk. Di tahun 2023 nanti, ada 25 titik yang sudah ada SK bupati. Semuanya di desa. Tanpa ada SK bupati, kita tidak bisa masuk," kata Adil di gedung dewan usai rapat dengan komisi III, Kamis 13 Oktober 2022.

Menurutnya, untuk penataan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan DPKPP

Kabupaten Cirebon, kawasan yang di bawah 10 hektare. Adapun kawasan yang di atas 10 hektare sampai 15 hektare menjadi kewenangan DPKPP provinsi. Kemudian di atas 15 hektare menjadi kewenangan kementerian.

"Di tahun 2023, ada 11 titik yang masuk kewenangan Kabupaten Cirebon," ucapnya.

Adapun kebutuhan rutilahu hingga 2024 totalnya sebanyak 11 ribu. Di tahun 2022 ada sebanyak 750 rutilahu. Programnya sedang berjalan. Sementara rutilahu untuk tahun 2023 slot yang direncanakan DPKPP Kabupaten Cirebon sebanyak 490 rutilahu.

"Tahun depan lebih rendah dibandingkan sekarang (2022, red) karena keterbatasan anggaran. Hanya 490 unit. Untuk bantuan rutilahu dari provinsi dan pusat belum dapat," jelasnya.

Adil mengaku, rutilahu itu sifatnya bantuan stimulus.

Nilainya sebesar Rp 20 juta. Peruntukannya, Rp 2,5 juta untuk jamban. Kemudian Rp 2,5 juta untuk upah tukang dan Rp 15 juta untuk material.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana usai rapat mempertanyakan terkait program yang akan dijalankan DPKPP di tahun 2023. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan ke DPKPP cukup besar. Hingga Rp 23 miliar.

"Seberapa banyak program rutilahu dan penuntasan kawasan kumuh di 2023?" kata Anton.

Anton mengaku, kawasan kumuh dan rutilahu tentu menjadi sorotan pihaknya. Sebab banyak yang masih membutuhkan. Bahkan, seringkali aspirasi masyarakat terkait hal itu bersarang ke DPRD. "Banyak aspirasi masyarakat soal kawasan yang kumuh dan rutilahu ke kita," tukasnya. ● **pra**

DELAPAN ORANG TERTIMBUN

Tim SAR Kesulitan Evakuasi Korban Longsor Susulan di Kebon Kalapa

BOGOR (IM)- Longsor susulan terjadi di wilayah Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah. Tepatnya di RT 03/02 Gang Barjo pada Rabu (12/10) sore.

Lokasi longsor susulan tak jauh dari Gang Kepatihan yang pada sehari sebelumnya juga mengalami longsor hingga memakan satu korban meninggal dunia.

Longsor terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, saat hujan deras turun di wilayah Kota Bogor. Tim gabungan dari BPBD Kota Bogor, PMI, Tagana juga TNI dan Polri langsung melakukan evakuasi di lokasi.

Diduga, ada delapan warga yang tertimbun bangunan. Hingga pukul 22.00 WIB, empat di antaranya sudah berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat.

"Empat orang Alhamdulillah sudah berhasil kami evakuasi dalam kondisi selamat. Yang terakhir kami evakuasi tadi sekitar pukul 19.00 WIB, Alhamdulillah dalam kondisi selamat. Tapi situasi di lapangan sulit karena tekanan dari tanah yang bergeser cukup tinggi, menyebabkan petugas kesulitan untuk evakuasi," ungkap Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Dedie menjelaskan, Rabu malam, pasukan Badan SAR Nasional (Basarnas) ikut membantu proses pencarian. Dengan harapan bisa mempercepat proses evakuasi dengan alat yang memadai. "Sehingga empat orang yang diduga masih tertimbun, bisa terselamatkan. Dengan asesmen cepat yang dilakukan Basarnas dengan tim gabungan dari Kota Bogor bisa mengantar waktu proses evakuasi," jelasnya.

Dedie memaparkan, di tengah cuaca ekstrem yang masih terus terjadi di Kota Bogor. Kedua, permasalahan utama adalah akses alat berat tidak bisa masuk. Karena ini permukiman cukup padat di situasi kondisi kontur yang sangat terjal. Jadi ini tingkat tanah yang labil masih menjadi faktor dan fenomena

cua ekstrem beberapa hari terakhir intensitas hujan dengan curah tinggi," jelasnya.

"Saya mengimbau kepada warga sesuai informasi dari BMKG bahwa fenomena cuaca ekstrem ini akan berlangsung sampai April 2023. Jadi ini bukan main-main," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Teofilo Patricio Freitas menambahkan, warga sudah mulai diungsikan di tempat yang lebih aman. Pencarian juga akan dilanjutkan terus.

"Harapan kami semua bisa ditemukan semua. Semalam tidak tercapai, lanjutkan hari ini. Medannya berat karena alat berat juga tidak bisa masuk. Hanya (tenaga) manusia saja," ungkap Theo.

Tim SAR Kesulitan Evakuasi

Sementara itu, Tim SAR kesulitan mengevakuasi lanjutan korban longsor di Kota Bogor, Kamis (13/10). Evakuasi lanjutan dilakukan untuk mencari tiga korban yang diduga masih tertimbun di Gang Barjo RT 03/02 Kelurahan Kebon Kalapa, Kota Bogor. Tim SAR kesulitan melakukan evakuasi karena terkendala cuaca dan kontur tanah.

Sementara itu, setelah sempat disalahkan di Masjid setempat, jenderal Simah (75), korban meninggal longsor di Gang Barjo RT 03/02 Kelurahan Kebonkalapa Bogor dimakamkan. Sejumlah warga dan kerabat mengantarkan pemakaman Simah di pemakaman wakaf Ciomas Bogor.

Diketahui, longsor di lokasi ini menimbun 8 warga. Lima warga sudah ditemukan petugas SAR dengan kondisi satu meninggal dan empat selamat, korban meninggal atas nama Simah, sementara korban selamat atas nama Ade, Ika, Zenal, dan Nadia. ● **gio**

Paguyuban Tempe Tahu Jabar Bakal Gelar Aksi Mogok Produksi

CIMAH (IM)- Rencana aksi mogok produksi Paguyuban Tahu Tempe Jabar mendapat respons terbalik dari Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia atau Kopti Kota Cimahi. Ketua Kopti Kota Cimahi, Kusnanto memastikan pihaknya tidak akan ikut andil dalam aksi mogok produksi massal perajin tempe tahu pada Senin (17/10) mendatang. Ajakan mogok itu disebarkan Paguyuban Tempe Tahu Jabar.

Meroketnya harga kedelai yang mencapai Rp13 ribu per kilogram mendapat protes dari perajin tempe tahu. Paguyuban Tempe Tahu Jabar bakal menggelar aksi mogok produksi massal selama tiga hari 17-19 Oktober 2022. Namun, Kopti Kota Cimahi enggan mengikuti seruan tersebut.

Kusnanto menilai, rencana aksi mogok produksi tersebut sebagai tindakan yang tergesa-gesa. Menurutnya, subsidi harga telah dilakukan pemerintah sejak 10 Oktober 2022, serta akan banyak merugikan perajin tempe dengan jumlah kecil.

"Sekarang harga kedelai merek Bola ada di kisaran Rp 12.250 per kilogram, setelah sebelumnya seharga Rp13 ribu per kilogram saat subsidi belum diturunkan," katanya kepada wartawan, Kamis (13/10).

Ia menilai, dampak dari aksi mogok selama tiga hari bakal membuat perajin tempe dengan jumlah kecil semakin

bangkrut. Sebab, jelas dia, bagi perajin skala kecil, durasi waktu tiga hari bakal membuat hilang mata pencaharian mereka.

"Bayangkan, sekarang sebelum mogok saja mereka sudah kesulitan mendapatkan keuntungan. Jika ditambah mogok semakin rugi mereka, belum lagi kepada pedagang tempe pasar pastinya akan terkena dampak juga," jelasnya.

Ia pun menduga, di tengah situasi mendekati tahun politik, mudah sekali aksi seperti ini ditanggung kepentingan politik. Sehingga, ia pun mengimbau seluruh perajin tempe tahu yang tergabung dalam KOPTI Kota Cimahi di Kampung Margaluyu untuk tidak mengikuti aksi mogok produksi tersebut.

"Kita tidak akan ikut mogok, karena dampaknya akan merugikan banyak orang. Mulai dari perajin, pedagang, hingga masyarakat akan terkena dampak kerugian," bebarnya.

Kendati tak mengikuti aksi mogok produksi massal tersebut, ia mengaku, pihaknya tetap mengkritisi kondisi harga kedelai yang fluktuatif.

"Langkah baiknya jika kedelai ditangani Bulog guna menjaga kestabilan harga pasaran," ujarnya.

"Kalau dikembalikan ke Bulog, minimal pemerintah bisa mengontrol harga dan langsung bisa mengecek jika ada ketidakstabilan harga pasar," tandasnya. ● **pra**

KPU Sosialisasi Verfak Peserta Pemilu, Namun Parpol 'Cuek'

BOGOR (IM)- Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi verifikasi faktual (Verfak) kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon Peserta Pemilu Tahun 2022, di Grand Hotel Orri, Mayor Oking Jaya Atmajaja, Citeureup, Kabupaten Bogor, Kamis (13/10).

Namun kehadiran parpol yang diundang hanya dihadiri oleh LO Parpol dan Parpol terkesan "cuek" mengikuti sosialisasi Verfak ini. "Kalau untuk undangan, tentunya KPU Kabupaten Bogor sudah berupaya mengundang, namun parpolnya yang memahami masalah mereka sehingga metrek tidak datang," kata Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Barat, Endun Abdul Haq saat menjadi narasumber dalam acara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Endun memaparkan, bahwa sesuai dengan jadwal, ditetapkan untuk verfak calon peserta partai politik mulai tanggal 15 Oktober-4 November 2022.

Namun bagi 9 partai lolos 4 kursi di Senayan Parliament Trosold (PT) tidak dilakukan verfak. Verfak ihanya berlaku bagi partai yang tidak masuk PT dan partai baru yang akan ikut pemilu 2024 mendatang di Verfak.

Karena itu, menurutnya, agar setelah pertemuan ini (sosialisasi verfak) kepada para calon peserta partai politik untuk persiapan diri verfak di kantor KPU Kabupaten Bogor dan verfak keanggotaan, kepengurusan, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan KTP.

Kabupaten Bogor nanti akan ada sampel anggota yang harus diverifikasi faktual. Daftar sampel itu ditentukan oleh KPU RI yang akan dikirim ke Kabupaten Bogor untuk dilakukan verifikasi faktual.

"Jika saat diverifikasi faktual, anggota parpol itu tidak bisa ditemui, maka KPU akan beritahu ke LO parpol bahwa anggota tersebut tidak dapat ditemui maka parpol diimbau untuk mengumpulkannya di kantor parpol. Jika tidak datang maka anggota itu akan ditelpon



KPU Kabupaten Bogor Sosialisasi Verfak Peserta Pemilu.

dari kantor parpol tersebut. Jika tidak ada juga klarifikasinya maka anggota itu dicoret," kata Endun Abdul Haq.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni mengatakan, sosialisasi verfak bagian terpenting untuk menjadi peserta pemilu tahun 2024. Hal ini sejalan dengan persiapan sebelum menerima lolos tidaknya verifikasi administrasi. Perlu dipersiapkan verfak sesuai dengan tahapan-tahapannya.

Oleh karena itu, Ia juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan stakeholder serta jajaran terbawah ikut membantu pelaksanaan verfak nanti. Ini mengingat Kabupaten Bogor memiliki wilayah kecamatan sebanyak 40 kecamatan dan 435 desa/kelurahan se Kabupaten Bogor.

"Akibat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di KPU Kabupaten Bogor, mohon dibantu untuk verfak nanti," kata Ummi Wahyu di hadapan calon peserta pemilu dan sekaligus membuka sosialisasi verfak peserta dengan

peserta partai politik.

Sementara Kadiv Teknis KPU Kabupaten Bogor, Yana Nurheryana, sebagai moderator membuka sosialisasi verfak dengan menghadirkan narasumber Bidang Teknis KPU Provinsi Jawa Barat, guna menjelaskan berbagai mekanisme untuk persiapan verfak. "Nanti kami dari KPU akan datang door to door ke anggota parpol yang namanya tercantum sebagai sampel yang dikirim KPU RI. Dimohon agar para anggota parpol tersebut bersiap menerima kedatangan KPU," ujar Yana.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan mengatakan tugas fungsi Bawaslu adalah sebagai pengawas pelaksanaan pemilu peserta partai politik. Oleh karena itu Bawaslu berharap agar semua prosedur dalam regulasi dipenuhi dan dijalankan. "Kami juga berharap, pendekatan persuasif dalam tahapan verfak ini dikedepankan. Tetap berkomunikasi dan bersinergi sebagai penyelenggara pemilu," ujar Abdullah. ● **gio**

Sekda Kab. Bogor Minta Semua Pihak Jadi Solusi Masalah Pekerja

BOGOR (IM)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin meminta semua yang hadir pada Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Kabupaten Bogor menjadi bagian dari solusi masalah pekerja. Hal tersebut dikatakan saat membuka Rapat Depekab, di Aula Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, Cibinong, Rabu (12/10).

Rakor dihadiri anggota Depekab Kabupaten Bogor, Serikat Pekerja (SP) Kabupaten Bogor, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor. Rapat diisi sosialisasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor. Sekda Burhanudin menerangkan, hari ini saya percaya Depekab dan SP, kita melakukan segala upaya melaksanakan tugas kita masing-masing. SP menjalankan amanah dari para buruh atau pekerja dan Depekab juga demikian. Dan hari ini kita mendapatkan pencerahan dari BPS, sehingga bisa terbarkan kaitan dengan data pekerja, seperti upah dan lain sebagainya.

"Saya pelajar beberapa hal, apa yang belum kita lakukan, yakni kehadiran Pemda untuk para buruh dan pekerja di luar undang-undang, ini yang harus kita pikirkan. Jadi salah satunya sebetulnya kita punya program

pelatihan, yang bisa dimanfaatkan," terang Burhanudin.

Ia menambahkan, misalnya ada teman-teman buruh atau pekerja yang di PHK, jika kita punya data spesifikasinya, kita bisa mengandalkan anggaran pelatihan seperti pelatihan las atau perbengkelan dan lain sebagainya. Ini yang sedang kami pikirkan bersama, jadi bagaimana Pemda hadir ketika ada buruh di PHK.

Maka, jika kita punya datanya, kita ajak mereka yang terkena PHK mengikuti program kami, kita berikan pelatihan. Jadi program pelatihan ini sebelum kemana-mana, kita tawarkan dulu mereka melalui SP dan Depekab," tandasnya.

Burhanudin menjelaskan, tantangan terbesar Kabupaten Bogor hari ini adalah bagaimana hak buruh bisa diberikan, buruh untung, pengusaha tetap untung, dan pemerintah diuntungkan dengan situasi yang kondusif. Maka kita semua harus jadi bagian dari solusi dan Pemda harus punya peranan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari menerangkan, sosialisasi dari BPS, berkaitan dengan menentukan para buruh dan pekerja di luar undang-undang, ini yang harus kita pikirkan. Jadi salah satunya sebetulnya kita punya program

BOGOR BANJIR DAN LONGSOR

Bima Arya: Permukiman di Pinggir Sungai jadi PR

BOGOR (IM)- Wali Kota Bogor, Bima Arya harus mempercepat keputusannya di sela kegiatan bersama Asosiasi Pemintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Solo. Bencana tanah longsor yang melanda kawasan Gang Barjo, Kecamatan Bogor Tengah, Rabu, (12/10) malam dan banjir di sejumlah titik menjadi alasannya. "Saya harus mempercepat pulang ke Bogor pagi ini. Seharusnya pulangnya baru nanti sore, tetapi saya percepat. Situasi emergency saya percepat pakai pesawat pulang," ujar Bima Arya, Kamis (13/10).

"Saya langsung pulang pamit izin ke pak wali dan teman-teman. Langsung mengkoordinasikan banjir di Kota Bogor karena volume air yang luar biasa dan lamanya," sambungnya menjelaskan.

Bima Arya meninggalkan Solo usai kunjungan jalan kaki bersama Wali Kota se Indonesia ke Kampanye Wisata Batik Kauman Solo. Politisi PAN itu berada di Solo

selama 2 hari sejak Rabu kemarin dalam kegiatan Apeksi di Solo Teckno Park. "Jadi ini memerlukan kesigapan kita semua. Saat ini pak wali sudah in charge ke sana. Ya, saya siang Insya Allah sudah di Bogor kembali di lapangan," jelasnya.

Menurut Bima Arya, Kota Bogor memang banyak sekali titik rawan dan lahan yang tidak stabil. "Nomor 1 volume, nomor 2 intensitas hujan yang lama. Bogor ini banyak sekali titik rawan, jadi lahan yang tidak stabil. Kemudian permukiman yang di pinggir sungai jadi ini PR yang sangat serius untuk Kota Bogor ke depan. Ada 12 Kelurahan yang dilintasi Giliwung," urai dia.

Dengan kondisi tersebut ia mengimbau warga yang berada di titik rawan benar-benar menghindari lokasi ketika hujan. Ia juga meminta warga selalu memantau melalui kanal saluran informasi dari pemerintah kota tentang situasi cuaca untuk siaga dan waspada. ● **gio**